

**HUBUNGAN KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT TERHADAP
KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN
PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI**

Afrida Tri Kustanti

Universitas Negeri Surabaya

Afridatk.ak@gmail.com

The aim of this study examine the relationship of Audit Committee competence, Audit Committee size and Audit Committee meeting to financial report timeliness. This study represent the empirical research which used purposive sampling technique to collect data. Data were collected using secondary data of 71 manufacturing company which listed in Indonesian Stock Exchange 2010-2014. Data analysis uses logistic regression with the program SPSS 21 for windows. The result of this study show that Audit Committee competence, Audit Committee size and Audit Committee meeting are not related to financial report timeliness.

Key Word: *Audit Committee Competence, Audit Committee Size, Audit Committee Meeting and Financial Report Timeliness.*

PENDAHULUAN

Menurut PSAK No. 1 (revisi 2009), laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Di pasar modal pengguna utama dari laporan keuangan adalah investor, investor

memerlukan informasi keuangan untuk mendukung keputusan agar dapat memaksimalkan utilitas investasinya. Acuan yang handal sebagai dasar pengambilan keputusan dapat diberikan jika laporan keuangan memiliki informasi yang berkualitas. Kualitas utama yang harus dimiliki oleh suatu informasi adalah relevansi dan realibilitas.

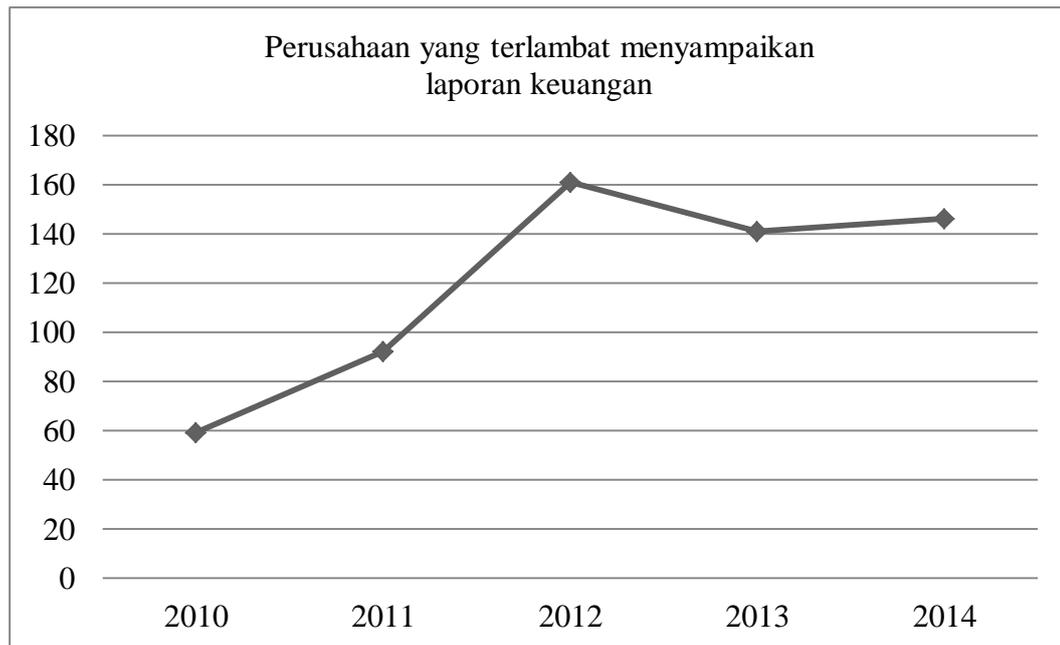
Namun terdapat beberapa kendala untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, salah satunya adalah ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan yang dipublikasikan. Apabila laporan keuangan tidak disajikan tepat waktu maka laporan keuangan tersebut akan kehilangan nilai informasinya, karena tidak tersedia saat pemakai laporan keuangan membutuhkan untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Masalah ketepatan waktu pelaporan dapat diminimalkan dengan pelaksanaan *good corporate governance*, salah satunya dengan peningkatan peran dan fungsi Komite Audit sebagai komite independen dalam perusahaan yang memiliki peran dan fungsi utama dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan, meningkatkan keyakinan publik serta mengurangi peluang terjadinya kecurangan dalam perusahaan.

Keberadaan Komite Audit dan Komisaris Independen pada perusahaan publik di Indonesia ditandai dengan keluarnya Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta (sekarang bernama Bursa Efek Indonesia) No.Kep-315/BEJ/06/2000 perihal: Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A, tentang ketentuan umum pencatatan efek bersifat ekuitas di Bursa. Peraturan tersebut menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), perusahaan yang tercatat di Bursa wajib memiliki Komite Audit dan Komisaris Independen. Peraturan ini telah diberlakukan secara efektif mulai

tanggal 1 Juli tahun 2000. Di dalam aturan tersebut, Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris.

Dalam Peraturan Bapepam No.IX.I.5: Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit serta Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No: Kep-29/PM/2004 yang diterbitkan pada 24 September 2004 menjelaskan Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris. Ika dan Ghazali (2012) berpendapat apabila komite audit memenuhi tanggung jawabnya untuk melakukan pengawasan pada kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan, kecil kemungkinan suatu perusahaan akan terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya.

Berdasarkan ketentuan Bapepam No.X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-346/BL/2011 yang menyebutkan bahwa emiten atau perusahaan publik yang telah efektif terdaftar di Bursa Efek, wajib menyampaikan laporan keuangan berkala pada Bapepam LK paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal pelaporan keuangan tahunan. Perusahaan yang terlambat dalam penyampaian laporan keuangan akan dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi dan denda. Sanksi dan denda yang dikenakan cukup berat, namun demikian perusahaan yang tidak dapat menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu cenderung meningkat setiap tahunnya. Berikut grafik perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu:



Gambar 1
Perusahaan yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan
Tahun 2010 - 2014

Sumber: <http://www.icamel.id/> (data diolah)

Pada tahun 2010 jumlah perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan hanya sebesar 59 perusahaan, kemudian pada tahun 2011 meningkat sebesar 92 perusahaan, pada tahun 2012 terdapat kenaikan signifikan yaitu sebesar 161 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan. Selanjutnya pada tahun 2013 mengalami sedikit penurunan yakni sebesar 141 perusahaan yang terlambat, namun kembali naik pada tahun 2014 terdapat 146 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas penulis termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul “Hubungan Karakteristik Komite Audit Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI.”

KAJIAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan dasar yang digunakan perusahaan untuk memahami *corporate governance*. Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*). Dalam hal ini hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara satu orang atau lebih yang memperkerjakan orang lain untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jensen dan Meckling, 1976).

Dalam teori agensi, agen diharuskan memberikan informasi yang rinci dan relevan kepada prinsipal. Namun, pada kenyataannya hal tersebut bukanlah hal yang mudah karena adanya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal. Kepentingan prinsipal sebagai pemegang saham adalah untuk memperoleh pengungkapan informasi oleh agen mengenai keadaan perusahaan secara relevan, tepat waktu dan akurat sebagai dasar pengambilan keputusan. Namun disisi lain, agen sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan kegiatan perusahaan tidak bergantung terhadap pengungkapan informasi tersebut dalam pembuatan keputusan (Mahendara, 2013)

Jadi, teori keagenan digunakan untuk membantu komite audit untuk membantu konflik kepentingan yang muncul antara pemilik dan manajemen. Dengan adanya komite audit diharapkan perusahaan dapat menyampaikan pelaporan keuangan perusahaan secara tepat waktu sehingga laporan keuangan tidak kehilangan relevansinya dan berguna bagi investor dalam mengambil keputusan.

Teori Pensinyalan (*Signaling Theory*)

Teori pensinyalan menjelaskan kenapa perusahaan memiliki motivasi untuk melakukan pengungkapan sukarela pada pasar, meskipun tidak ada aturan yang mewajibkannya. Perusahaan berkompetisi untuk mendapatkan sumber daya modal yang terbatas, dan pengungkapan informasi sukarela merupakan hal penting dalam memenangkan persaingan (Wolk *et al.*, 2000)

Teori *Singnaling* menyatakan bahwa perusahaan yang berkualitas baik dengan sengaja akan memberikan sinyal kepada pasar, dengan demikian pasar diharapkan dapat membedakan pasar yang berkualitas baik dan buruk (Hartono, 2005) Agar sinyal tersebut efektif, maka harus ditangkap pasar dan dipersepsikan, serta tidak mudah serta tidak mudah ditiru oleh perusahaan yang berkualitas buruk (Mengginson dalam Hartono, 2005).

Pensinyalan (*signaling*) didasarkan pada adanya *asymetric information*, atau ketidaksamaan akses terhadap informasi. Salah satu cara untuk mengurangi ketidaksamaan akses informasi adalah dengan cara: satu pihak memberikan sinyal yang akan mengungkapkan informasi yang relevan kepada pihak lain. Pihak yang menerima sinyal kemudian akan mengartikan sinyal yang diterima dan kemudian mereaksi dengan menawarkan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah.

Komite Audit

Pengertian komite audit adalah salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris dengan tugas dan tanggungjawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip *good corpotare governance* terutama transparansi dan *disclousure* diterapkan secara konsisten dan memadai oleh para eksekutif (Tjager *et al.*, 2003).

Keberadaan Komite Audit pada perusahaan publik di Indonesia secara resmi dimulai sejak bulan Juni 2000 yang ditandai dengan keluarnya Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No: Ke-315/BEJ/06/2000 perihal: Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A: Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa. Berbagai ketentuan dan peraturan mengenai komite audit telah dibuat diantaranya:

- a. Pedoman *Good Corporate Governance* (Maret, 2001) yang menganjurkan semua perusahaan di Indonesia memiliki Komite Audit.
- b. Surat Edaran BAPEPAM No. SE-03/PM/2000 yang merekomendasikan perusahaan-perusahaan publik memiliki Komite Audit, sebagaimana diperbaharui dengan Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Peraturan Nomor IX.1.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- c. Kep. 339/BEJ/07-2001, yang mengharuskan semua perusahaan yang listed di Bursa Efek Jakarta memiliki Komite Audit.
- d. Keputusan Menteri BUMN No. KEP-103/MBU/2002 yang mengharuskan semua BUMN mempunyai Komite Audit.
- e. Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 yang mengharuskan semua BUMN mempunyai Komite Audit.

Tugas dan tanggung jawab komite audit telah diatur dalam Surat Keputusan ketua Bapepam nomor: KEP-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003, Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris antara lain:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
- c. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.
- d. Melaporkan kepada Komisaris berbagai resiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen resiko oleh direksi.
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Emiten atau perusahaan publik.
- f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.
- g. Membuat pedoman kerja komite audit (*Audit Committee Charter*)

Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Informasi yang dikatakan relevan adalah jika disampaikan secara tepat waktu. Ketepatan waktu tidak menjamin relevansi, tetapi relevansi informasi tidak dimungkinkan tanpa ketepatan waktu informasi mengenai kondisi dan posisi perusahaan harus cepat dan tepat waktu sampai ke pengguna laporan keuangan. Tepat waktu diartikan bahwa informasi harus disampaikan sedini mungkin agar dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.

Dalam rangka memberikan informasi yang lebih cepat dan akurat kepada investor mengenai kondisi keuangan emiten atau perusahaan publik serta dalam rangka mengikuti perkembangan pasar modal global, pada tanggal 5 Juli 2011 Bapepam mengeluarkan Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep/346/BL/2011 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, laporan keuangan harus disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Pengembangan Hipotesis

Hubungan Kompetensi Komite Audit terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan.

Dalam Peraturan Bapepam no. IX.I.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No: Kep-29/PM/2004 yang diterbitkan pada 24 September 2004 mensyaratkan bahwa salah seorang dari anggota komite audit harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan, memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan, memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Anggota Komite Audit yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan dipandang dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan perusahaan dalam hal ini kaitanya dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hashim dan Rahman (2011) serta Wijaya (2012) bahwa kompetensi Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kompetensi komite audit berhubungan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Hubungan Ukuran Komite Audit terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan.

Dalam Peraturan Bapepam no. IX.I.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No: Kep-29/PM/2004 yang diterbitkan pada 24 September 2004 mensyaratkan jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya tidak kurang dari 3 (tiga) orang yang diketuai satu orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang dari luar perusahaan yang independen terhadap perusahaan. Namun, jumlah anggota Komite Audit pada perusahaan publik di Indonesia bermacam-macam, hal ini memunculkan pemikiran bahwa semakin banyak jumlah anggota Komite Audit dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan yaitu dalam ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, dengan semakin banyaknya jumlah anggota komite audit maka cenderung untuk memiliki kekuatan atau power yang lebih besar (Kalbers dan Fogarty, 1993 dalam Abawayya 2010), serta berhubungan positif dengan kualitas pelaporan keuangan (Felo et al., 2003 dalam Abawayya 2010).

Nor *et al.*, (2010) dan Wijaya (2012) menyatakan bahwa jumlah anggota Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian

laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Ukuran Komite Audit berhubungan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Hubungan Frekuensi Pertemuan Komite Audit terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan.

Dalam Peraturan Bapepam no. IX.I.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No: Kep-29/PM/2004 yang diterbitkan pada 24 September 2004 mensyaratkan Komite Audit melakukan pertemuan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan rapat dewan komisaris yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan. Komite Audit biasanya perlu untuk mengadakan pertemuan tiga sampai empat kali dalam satu tahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya (FCGI, 2002). Namun dalam peraturan terbaru oleh Ketua Bapepam No: KEP-41/PM/2003, yaitu komite audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan. Hal tersebut mengindikasikan jika semakin sering anggota Komite Audit melakukan pertemuan atau rapat maka akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dalam hal ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Nor *et al.*, (2010) menyatakan bahwa pertemuan komite audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Frekuensi pertemuan Komite Audit berhubungan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini akan menguji hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah Kompetensi Komite Audit, Ukuran Komite Audit dan Frekuensi Pertemuan Komite Audit, sedangkan untuk variabel terikat dari penelitian ini adalah Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen yaitu laporan tahunan (*annual report*) perusahaan manufaktur yang *go public* dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Data tersebut diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia <http://idx.co.id/>.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Proses seleksi sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam *purposive sampling* dalam penelitian ini digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 1
Rincian Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan manufaktur yang <i>listed</i> di BEI periode 2010-2014	128
2.	Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan tahunan perusahaan pada periode 2010-2014	(27)
3.	Pada laporan tahunan perusahaan tidak terdapat informasi lengkap	(30)
	Jumlah sampel	71
	Periode penelitian	5
	Total jumlah sampel selama periode penelitian	355

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (*timeliness*). Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah kompetensi Komite Audit (*ACComp*), ukuran Komite Audit (*ACSize*) dan frekuensi pertemuan Komite Audit (*ACMeet*). Pengukuran untuk variabel ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan menggunakan *variabel dummy*, 1 (satu) untuk perusahaan yang tepat waktu, dan 0 (nol) untuk perusahaan yang terlambat. Untuk variabel kompetensi Komite Audit (*ACComp*), ukuran Komite Audit (*ACSize*) dan frekuensi pertemuan Komite Audit (*ACMeet*) diukur dengan menggunakan angka absolut.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan model regresi logistik, karena variabel dependen menggunakan variabel kategorikal dan variabel independen merupakan campuran antara variabel kontinyu (metrik) dan kategorikal (non-metrik) (Ghozali, 2009:261). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan skala nominal (kategorikal), yaitu apakah perusahaan telah menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu atau tidak. Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kompetensi komite audit (*ACComp*), ukuran Komite Audit (*ACSize*), serta frekuensi pertemuan Komite Audit (*ACMeet*) yang ketiganya diukur dengan angka absolut.

Dalam penelitian ini tidak melakukan uji normalitas data karena menurut Ghozali (2009) regresi logistik tidak memerlukan asumsi normalitas pada variabel bebasnya. Asumsi *multivariate normal distribution* tidak dapat dipenuhi karena

variabel bebasnya merupakan campuran antara kontinyu (metrik) dan kategorikal (non-metrik) (Hair, 2000).

$$\text{Ln} \frac{TL}{1 TL} = \beta_0 + \beta_1 ACComp + \beta_2 ACSize + \beta_3 ACMeet + \varepsilon$$

Keterangan :

$\text{Ln} \frac{TL}{1 TL}$ = *Dummy variabel* ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

ACComp = Kompetensi komite audit

ACSize = Ukuran komite audit

ACMeet = Frekuensi pertemuan komite audit

ε = Error

Analisis pengujian dengan regresi logistik menurut Singgih Santoso (2001) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit Test*)

Uji kelayakan model regresi digunakan untuk menilai data empiris yang digunakan telah cocok atau sesuai dengan model regresi (tidak ada perbedaan model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). Menurut Ghozali (2005), *goodness of fit test* dapat dilakukan dengan memperhatikan *output* dari *Hosmer and Lemeshow's Goodness of fit test*.

Uji Kelayakan Keseluruhan Model (*Overall Fit Model Test*)

Overall Model Fit Test digunakan untuk mengetahui ukuran kelayakan model yang dipakai, yang dinyatakan dengan berapa persen variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen yang dimasukkan ke dalam model logit.

Uji Koefisien Regresi

Pengujian koefisien regresi dilakukan untuk menguji seberapa jauh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen yaitu ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Koefisien regresi logistik dapat ditentukan dengan menggunakan *p-value* (*probability value*).

Uji Wald

Uji wald merupakan pengujian signifikan koefisien secara sendiri-sendiri. Uji signifikansi secara parsial ini untuk melihat hubungan masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen,

HASIL

Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit Test*)

Uji kelayakan model regresi *binary logistic* dengan uji *Hosmer and Lemeshow* diperoleh nilai chi-square sebesar 6,340 dengan taraf signifikansi 0,501. Taraf signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 atau 5% maka H_0 diterima, sehingga dapat disimpulkan model mampu memprediksi nilai observasi tersebut.. Hal ini berarti model regresi *binary logistic* dengan variabel dependen ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan adalah sesuai dengan data sehingga layak dipakai untuk analisis selanjutnya.

Tabel 2
Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	Df	Sig.
1	6,340	7	0,501

Sumber : Data Sekunder yang diolah.

Uji Kelayakan Keseluruhan Model (*Overall Fit Model Test*)

Hasil pengujian *Overall Fit Model Test* pada hasil pengolahan data ditunjukkan dengan nilai *Cox & Snell R Square* sebesar 0,024 serta nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0,039. Nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0,039 menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 3,9% sedangkan sisanya sebesar 96,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Tabel 3
Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	340,974 ^a	0,024	0,039

Sumber : Data Sekunder yang diolah.

Uji Koefisien Regresi

Untuk membentuk model persamaan regresi logistik dari data penelitian maka perlu diketahui koefisien regresinya terlebih dahulu, berikut ini disajikan tabel koefisien regresi logistik berdasarkan pengolahan data penelitian spss 21.

Tabel 4
Koefisien Regresi Logistik

Variabel	β	P
<i>ACComp</i> (X1)	0,238	0,204
<i>ACSize</i> (X2)	0,722	0,167
<i>ACMeet</i> (X3)	0,044	0,224
Konstanta	-1,516	0,333

Sumber : Data Sekunder yang diolah.

Hasil pengujian model regresi logistik di atas dapat diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$\text{Ln} \frac{TL}{1 TL} = -1,516 + 0,238X_1 + 0,722X_2 + 0,044X_3$$

Dari persamaan diatas diketahui bahwa variabel kompetensi komite audit (X1), ukuran komite audit (X2), dan frekuensi pertemuan komite audit (X3) memiliki arah hubungan positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (Y).

Uji Wald

Tabel 5
Variables in the Equation

Variabel	Keterangan	B	Wald	Sig.	Kesimpulan
X1	<i>ACComp</i>	0,238	1,617	0,204	Tidak Signifikan
X2	<i>ACSize</i>	0,722	1,911	0,167	Tidak Signifikan
X3	<i>ACMeet</i>	0,044	1,478	0,224	Tidak Signifikan

Sumber : Data Sekunder yang diolah.

Pada tabel diatas menunjukkan signifikansi hubungan masing-masing variabel independen (secara parsial) terhadap variabel dependen. Dari hasil analisis regresi *binary logistic* diketahui bahwa kompetensi Komite Audit (*ACComp*), ukuran Komite Audit (*ACSize*), frekuensi pertemuan Komite Audit (*ACMeet*) tidak memiliki hubungan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi dari ketiganya memiliki nilai lebih besar dari 0,05 yaitu 0,204 untuk kompetensi Komite Audit, 0,167 untuk ukuran Komite Audit dan 0,224 untuk frekuensi pertemuan Komite Audit.

PEMBAHASAN

Hubungan Kompetensi Komite Audit terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Hasil penelitian pada pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa kompetensi komite audit tidak memiliki peluang hubungan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, sehingga hipotesis pertama **ditolak**. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tinambunan *et al.*, (2012). Namun berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hashim dan Rahman (2011) serta Wijaya (2012) bahwa kompetensi komite audit berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti, meskipun anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pengetahuan akuntansi dan keuangan, namun apabila tidak memiliki pengalaman kerja menjadi anggota Komite Audit juga dapat menjadi salah satu faktor tidak adanya hubungan Kompetensi Komite Audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Selanjutnya, juga dapat disebabkan oleh *disagreement* yang terjadi antara pihak manajemen dengan auditor eksternal. Komite Audit dituntut untuk dapat bertindak sebagai seorang yang independen dan juga berkompeten sehingga mampu menjembatani antara eksternal auditor dan manajemen dan juga sekaligus menjembatani antara fungsi pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor. Beberapa hal tersebut menyebabkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara kompetensi Komite Audit dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Tidak adanya hubungan antara kompetensi Komite Audit dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan juga dapat disebabkan karena terdapat beberapa perusahaan yang tidak patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM, karena dalam data penelitian terdapat beberapa perusahaan yang anggota Komite Auditnya tidak memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi dan/ atau keuangan.

Hubungan Ukuran Komite Audit terhadap terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Hasil penelitian pada pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa ukuran komite audit tidak memiliki peluang hubungan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan, sehingga hipotesis kedua **ditolak**. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Widyaswari (2013) yang menyatakan bahwa ukuran Komite Audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Namun tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh Felo *et al.*, (2003) dan Nor *et al.*,(2010) yang menyatakan bahwa ukuran Komite Audit memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Hal tersebut dapat disebabkan karena semakin besar jumlah atau ukuran Komite Audit akan mengakibatkan susahnyanya membentuk jaringan komunikasi dan koordinasi yang baik antar anggota Komite Audit. Selain itu, akan cukup sulit untuk mencapai mufakat dari keterlibatan anggota Komite Audit yang berjumlah besar dalam pengambilan keputusan. Alasan selanjutnya adalah pembentukan Komite Audit di perusahaan hanya bersifat pemenuhan kewajiban (*mandatory*) terhadap peraturan yang ada.

Hubungan Frekuensi Pertemuan Komite Audit terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Hasil penelitian pada pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa frekuensi pertemuan komite audit tidak memiliki peluang hubungan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, sehingga hipotesis ketiga **ditolak**. Hasil penelitian sejalan dengan Hashim dan Rahman (2011) serta Wijaya (2012) yang menyatakan bahwa pertemuan Komite Audit tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Namun, penelitian ini tidak sesuai penelitian Nor *et al.*, (2010) dan Tinambunan *et al.*, (2013) yang menyatakan jika frekuensi rapat atau pertemuan berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Komite Audit dalam mengawasi proses pelaporan keuangan perusahaan tidak dapat ditentukan oleh tingginya aktivitas yang dilakukan oleh anggota Komite Audit melalui rapat/pertemuan. Tidak adanya hubungan antara frekuensi pertemuan Komite Audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dapat dikarenakan rendahnya frekuensi pertemuan rutin Komite Audit berdasarkan laporan tahunan (*annual report*) tahun 2010-2014, sehingga masalah-masalah yang terkait dengan laporan keuangan perusahaan tidak dapat didiskusikan dengan eksternal auditor, internal auditor, dewan komisaris dan dewan direksi.

SIMPULAN

Berdasarkan analisa diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi Komite Audit, ukuran Komite Audit dan frekuensi pertemuan Komite Audit tidak

berhubungan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, hal ini dapat disebabkan oleh berbagai alasan yaitu, meskipun berlatarbelakang pendidikan akuntansi namun tidak semua anggota Komite Audit memiliki pengalaman kerja sebagai Komite Audit sebelumnya, terjadinya *disagreement* antara pihak manajemen dan auditor eksternal, terdapat beberapa perusahaan yang tidak patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM, sulitnya membentuk jaringan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan anggota Komite Audit yang berjumlah besar, rendahnya frekuensi pertemuan Komite Audit sehingga masalah-masalah yang terkait dengan laporan keuangan perusahaan tidak dapat didiskusikan dengan eksternal auditor, internal auditor, dewan komisaris dan dewan direksi, serta pembentukan komite audit di perusahaan hanya bersifat pemenuhan kewajiban (*mandatory*) terhadap peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abawayya, N. R., 2010. *Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Kondisi Financial Distress (Studi Empiris pada Perusahaan Non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006-2008)*. Universitas Diponegoro
- BAPEPAM. 2000. Pembentukan Komite Audit, Surat Edaran Bapepam No. SE-03/PM/2000
- BAPEPAM. 2001. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.KEP-339/BEJ/07-2001 tentang Komisaris Independen dan Komite Audit
- BAPEPAM. 2003. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-41/PM/2003 tentang pembentukan dan pedoman kerja komite audit
- BAPEPAM. 2004. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-29/PM/2004 (Peraturan Nomor IX.I.5) tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kinerja Komite Audit

- BAPEPAM. 2011. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.Kep-346/BL/2011 (Peraturan Nomor X.K.2) tentang Peenyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik
- FCGI. 2002. Tata Kelola Perusahaan (CG) The Essence of Good Corporate Governance Konsep dan Implementasi Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia. Yayasan Pendidikan Pasar Modal Industri & Sinergy Communication. Jakarta
- Felo, Andrew J, et al. 2003. *Audit Committee Characteristic and The Perceived Quality of Financial reporting An Empirical Analysis*. Working Paper: 1-40
- Hair, J.F .Jr., Bush, R., and Ortinau, D.J. 2000. *Markerting research: A practical approach for the new millenium, international edition*. McGraw-Hill
- Hartono. 2005. *Hubungan Teori Signalling dengan Underpricing Saham Perdana di Bursa Efek Jakarta*. Jurnal Bisnis dan Manajemen, 5 (1), hal. 35-50.
- Hashim, and Rahman. 2011. *Audit Report Lag and the Effectiviteness of Audit Commitee Among Malaysian Listed Companies*. International Bulletin of Business Administration ISSN: 1451-243X Issue 10 (2011) ©EuroJournals, Inc. 2011 <http://www.eurojournals.com/>
- Ika, Siti Rochmah, and Nazli A Mohd Ghazali. 2012. *Audit Committee Effectiveness and Timeliness of Reporting*. Indonesian evidence, Managerial Auditing Journal Vol.27 No.4
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. ED PSAK No.1 (Revisi 2009). Salemba Empat. Jakarta
- Imam Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Jensen, M. C., dan W. H. Meckling. 1976. *Theory of Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Struture*. Journal of Financial Economic. Vol.3. No. 4. Hal: 305-360
- Jogiyanto, Hartono, 2005. *Analisis & Desain Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*. Andi. Yogyakarta.
- Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep 315/BEJ/06-2000 tanggal 30 Juni 2000. Paraturan Pencatatan Efek Nomor I-A: Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa

- Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-103/MBU/2002 Tentang Komite Audit. Jakarta.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Jakarta.
- Kwayanti, Devy. 2013. *Hubungan efektivitas Komite Audit terhadap Penyampaian Pelaporan Keuangan Tahunan Perusahaan Publik Sektor Manufaktur Tahun 2011*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.2 No.2
- Mahendra, Yudha Andreas. 2013. *Pengaruh Karakteristik Personal Komite Audit Terhadap Real Earnings Management*. Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Nor, Shafie, and Hussin. 2010. *Corporate Governance and Audit report lag in Malaysia*. Asian Accademy of Managerial Journal of Accounting and Finance, Vol. 6, No. 2, 57-84, 2010
- Pamudji, Sugeng dan Aprilia Trihartati. 2010. *Pengaruh Independensi dan Efektivitas Komite Audit terhadap Manajemen Laba*. Jurnal dinamika Akuntansi, 2 (1): 21-29
- Santoso, Singgih. 2000. *Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- The Indonesian Institute for Corporate Governance. 2002. www.iicg.org
- Tinambunan, Hotman, dkk. 2013. *Karakteristik Komite Audit dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)*. Manado: Simposium Nasional Akuntansi XVI.
- Tjager, I Nyoman, F. Antonius Alijoyo, Humprey R. Djemat, Bambang Soembodo. 2003. *Corporate Governance. Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Jakarta. Prenhallindo
- Widyaningdyah, Agnes Utari. 2001. *Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Earnings Management pada Perusahaan Go Public di Indonesia*. Journal Akuntansi & Keuanagan. Vol.3, No.2

Widyaswari, Komang R dan Keteut Ali Suardana. 2014. *Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Timeliness Pelaporan Keuangan: Perusahaan Go Public yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 6-1: 154-166

Wijaya, Aditya Taruna. 2012. *Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Audit Report Lag*. Jurnal Universitas Diponegoro.

Wolk *et, al.* 2000. *Accounting Theory: A Conceptual Institutional Approach, Fifth Edition*. South-Western College Publishing

www.idx.co.id

www.icamel.id